



# Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari: Bapperida Sanggau Hadiri Finalisasi Dokumen SFAPLUP dan Penandatanganan Community Agreement



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sanggau menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Profil SFAPLUP, Diseminasi Hasil SFAPLUP, serta Penandatanganan Community Agreement bagi 17 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Sanggau Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapperida Kabupaten Sanggau. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Bapperida juga memaparkan materi bertema “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Implementasi IAD dan Sebaran Pembangunan Daerah”. Paparan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola perhutanan sosial yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat



Agenda ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan hasil perencanaan tata guna lahan partisipatif pada areal perhutanan sosial (SFAPLUP) dari 17 KPS, baik berupa dokumen profil maupun peta Rencana Tata Guna Lahan Partisipatif (RTGL). Dokumen ini menjadi arah pengelolaan areal kerja perhutanan sosial yang selaras dengan perencanaan dan pembangunan desa di Kabupaten Sanggau.
2. Membangun kesepahaman bersama antara anggota KPS, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten Sanggau mengenai pentingnya pengelolaan perhutanan sosial sebagai akses legal yang mampu memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat desa di 17 KPS dan 14 desa sasaran.
3. Mendiskusikan serta menyepakati dokumen Community Agreement, yang ditandatangani oleh masing-masing KPS dan memperoleh dukungan para pihak di tingkat desa maupun kabupaten. Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk memastikan keberlanjutan implementasi kelembagaan, usaha, serta pengelolaan wilayah dengan melibatkan masyarakat secara aktif, menjunjung kesetaraan gender, dan membuka ruang bagi peran generasi muda dalam prinsip pengelolaan hutan lestari.

Sebagai salah satu tindak lanjut strategis, dokumen SFAPLUP beserta peta RTGL akan menjadi rujukan dalam evaluasi perubahan objek dan subjek KPS. Hal ini diharapkan memperkuat dasar perencanaan dan pengembangan perhutanan sosial yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sanggau.

Kegiatan ini menandai langkah penting dalam penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat pengelola hutan sosial menuju tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.